

Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare (Studi Kasus: Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare)

Sustainability of Urban Area Development Based on the Preparation of Green Open Spaces in Parepare City (Case Study: Bacukiki District, Parepare City)

Andi Mirza Azilia^{1*}, Mary Selintung², Syafri³

¹Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Sulawesi Selatan

²Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

³Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*E-mail: _mirzaazilia@gmail.com

Diterima: 10 September 2023/Disetujui: 30 Desember 2023

Abstrak. Isu keberlanjutan menjadi populer, pemicunya adalah fenomena pemanasan global yang mengkhawatirkan keberlangsungan kehidupan di Bumi. Gejalanya adalah meningkatnya suhu rata-rata di Bumi yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui capaian pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Parepare di Kecamatan Bacukiki. Metodologi penelitian yang digunakan didasarkan pada pendekatan kualitatif melalui interpretasi data sekunder yang tersedia dan dapat diakses oleh umum. Ruang terbuka hijau (RTH) menjadi salah satu fungsi penting dalam alokasi peruntukan setiap wilayah yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem. Sesuai ketentuan peraturan perundangan, ditetapkan besaran 30% untuk fungsi RTH dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Dalam pelaksanaannya sebagian besar wilayah belum berhasil memenuhi capaian sesuai besaran yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran RTH dan mengidentifikasi strategi yang dilakukan dalam rangka memenuhi penyediaan RTH untuk mencapai target yang disyaratkan. Menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dua jenis data mencakup data luas eksisting RTH publik dan data strategi penyediaan RTH. Data luas RTH diperoleh melalui interpretasi citra yang didigitasi dan divalidasi dengan ground survey, sementara data strategi penyediaan RTH diperoleh melalui sumber sekunder dari laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Maka diperlukan strategi untuk meningkatkan RTH dengan mulai berpikir alternatif melalui peningkatan RTH privat dan pemenuhan RTH Publik.

Kata Kunci : Keberlanjutan Pembangunan, Ruang Terbuka Hijau, Wilayah Perkotaan, Bacukiki, Parepare

Abstract. The issue of sustainability has become popular, the trigger is the phenomenon of global warming which is worrying about the continuity of life on Earth. The symptom is an increase in the average temperature on Earth caused by the effects of greenhouse gases. The aim of the study is to determine the achievement of fulfilling Green Open Space in the Parepare Urban Area in Bacukiki District. The research methodology used is based on a qualitative approach through interpretation of secondary data that is available and accessible to the public. Green open space is an important function in the allocation of land use for each area which functions to maintain ecosystem balance. In accordance with statutory provisions, the amount is set at 30% for green open space functions with a proportion of 20% public green open space and 10% private green open space. In its implementation, most regions have not succeeded in meeting the achievements according to the stipulated amounts. This research aims to determine the size of green open space and identify the strategies carried out to fulfill the provision of green open space to achieve the required targets. Using a descriptive approach, this research was carried out to obtain two types of data including data on the existing area of public green open space and data on strategies for providing green open space. Data on the area of green open space was obtained through digitized image interpretation and validated with a ground survey, while data on the strategy for providing green open space was obtained through secondary sources from the 2021 South Sulawesi Provincial Public Works and Spatial Planning Service report. Strategy to increase the area of public green open space through planting trees along roads, land acquisition for green areas in settlements, and clearance of river borders from buildings for re-function as green open spaces. The increase has been quite

slow, and the area obtained has not been able to increase the green open spaces significantly. Another strategy is needed to increase green open space by starting to think about alternatives by increasing private green open space.

Keywords: Sustainable Development, Green Open Space, Urban Area, Bacukiki, Parepare



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan adalah bentuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini tidak hanya mencakup aspek lingkungan yang berkelanjutan tetapi juga bergantung pada komunitas yang berkelanjutan (Lestari *et al.*, 2023). Keberlanjutan perkotaan melibatkan fungsi harmonis subsistem utama kota, termasuk aspek ekonomi, sosial, fisik, dan lingkungan, untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang penghuninya dan pelestarian sumber daya alam (Benton-Short & Keeley, 2023). Kota-kota mengadaptasi infrastruktur dan sistem alamnya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, membangun kembali ruang perkotaan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan pilihan transportasi berkelanjutan, dan mengatasi masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan lingkungan.

Kota berkelanjutan adalah kota yang menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ini melibatkan pembangunan terkoordinasi pembangunan sosial manusia dan lingkungan ekologis, dan pembangunan berkelanjutan di bawah daya dukung lingkungan alam (Tian *et al.*, 2023). Dampak pariwisata terhadap cara hidup penduduk dan penawaran perdagangan yang dipromosikan oleh pariwisata dapat mempengaruhi keberlanjutan kota (Utami *et al.*, 2023). Kota-kota berkelanjutan juga menggabungkan bentuk energi berkelanjutan dan memanfaatkan fungsi Internet of Things untuk mempromosikan efisiensi energi, pemantauan kualitas udara, dan keselamatan (Rama *et al.*, 2022). Mengevaluasi tingkat keberlanjutan kota dapat membantu memandu ekonomi perkotaan menuju efisiensi, stabilitas, dan inovasi dengan konsumsi sumber daya minimal (Botsios *et al.*, 2022).

Pemerintah menerapkan P2KH (Program Pembangunan Kota Hijau) untuk menciptakan kelestarian lingkungan. Sebagai bagian dari program ini, mereka mengembangkan Green Open Space Urban Areas (RTHKP) yang meliputi City Forest, City Green Line, City Park, Tourist Park, Cemetery, Yard, Farm, and Plantation (Toda *et al.*, 2023). Pengembangan ruang hijau ini memiliki beberapa manfaat, seperti meningkatkan iklim mikro lingkungan perkotaan, mempromosikan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental pengguna dan tetangga (Perdigones *et al.*, 2023). Selain itu, penyediaan ruang hijau, seperti taman,

memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perkotaan dengan memecahkan masalah lingkungan dan menawarkan berbagai layanan ekosistem kepada penduduk kota (Mahendra & Dwijendra, 2022). Namun, ada kecenderungan pengurangan area taman, yang mengarah pada kebutuhan taman universal multi-fungsi di lahan yang relatif kecil (Lee & Kim, 2023). Untuk memastikan keberhasilan pembangunan ruang hijau ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak sosial, aspek ekonomi, dan penerapan energi hijau.

Pengembangan RTH diajukan pemerintah melalui PERDA Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. Komposisi RTH daerah adalah 30 persen terdiri dari RTH publik (20 persen) dan RTH privat (10 persen). Menurut Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare keberadaan RTH publik di Kota Parepare belum memenuhi 20 persen namun privat keberadaannya lebih dari 10 persen.

Analisis skenario adalah alat yang digunakan untuk mengarahkan persepsi masyarakat tentang peristiwa masa depan. Ini melibatkan pembuatan model yang berbeda untuk membayangkan kemungkinan masa depan. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dapat mengambil manfaat dari analisis skenario untuk memahami realisasi masa depan kota berkelanjutan. Dengan mengeksplorasi berbagai skenario, kota dapat mengidentifikasi lintasan dan jalur menuju menjadi komunitas yang berkelanjutan (Lovie, 2020). Konstruksi kelembagaan skenario masa depan untuk kota melibatkan dimensi regulasi, normatif, dan kognitif. Skenario ini mencerminkan kepentingan dan keprihatinan dari berbagai aktor dan membentuk visi masa kini (Romanelli, 2023). Memahami dampak urbanisasi terhadap lingkungan sangat penting untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan penting antara morfologi perkotaan dan keberlanjutan sosial-ekonomi dan lingkungan (Mihaylov & Sala, 2022). Kota memainkan peran penting dalam mengatasi perubahan iklim dan implikasinya yang lebih luas. Mereka membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat internasional untuk mengatasi tantangan ini secara efektif (Purcell, 2022). Secara keseluruhan, analisis skenario dapat memberikan wawasan berharga tentang masa depan kota berkelanjutan dan memandu proses pengambilan keputusan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui capaian pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Parepare di Kecamatan Bacukiki.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare: (a) Pengembangan RTH Publik berdasarkan Kegiatan Inventarisasi Dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Ajatappareng Tahun 2021; dan (b) Pengembangan RTH Privat Berdasarkan Kegiatan Inventarisasi Dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Ajatappareng Tahun 2021.
- (2) Pengembangan RTH dari aspek pengembangan sosial, ekonomi, lingkungan
- (3) Pengembangan Analisis RTH Berdasarkan analisis *Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting* (TAIDA).
- (4) *Analisis* Faktor Pendorong dan Penghambat pengembangan RTH dalam mewujudkan *sustainable city*.

Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Kebijakan

a) RTRW Kota Parepare

Muatan kebijakan terkait ruang terbuka hijau pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 RTH publik yang telah ada di Kota Parepare meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.968 ha atau sekitar kurang lebih 20 persen dari luas wilayah Kota Parepare yang meliputi:

- 1) Taman kota terdistribusi di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas kurang lebih 22 ha;
- 2) Kawasan taman hutan raya, yang terletak di kompleks hutan Alitta Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, dengan luas kurang lebih 84 ha;
- 3) Kawasan kebun raya, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah dan Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, dengan luas kurang lebih 13 ha;
- 4) Kawasan hutan kota terletak di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang dan Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung (eks kompleks gabungan dinas jalan Ganggawa) dengan luas kurang lebih 2 ha;
- 5) Pemakaman umum dan swasta terletak di Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat seluas kurang lebih 22 ha;
- 6) Daerah penyangga hutan lindung (hutan plasma nutfah) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki seluas kurang lebih 120 ha;
- 7) Kawasan hutan kota meliputi kecamatan Bacukiki, kecamatan Bacukiki Barat, kecamatan

Ujung, dan kecamatan Soreang dengan luas kurang lebih 10 ha;

- 8) kawasan sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah Kota Parepare dengan luas kurang lebih 1.088 ha;
 - 9) kawasan sempadan pantai tersebar di wilayah pesisir Kota Parepare dengan luas kurang lebih 194 ha;
 - 10) kawasan agrowisata di kelurahan Watang Bacukiki kecamatan Bacukiki dan di kelurahan Lemoe kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 398 ha; dan lapangan olahraga/lapangan terbuka hijau tersebar di Kota Parepare dengan luas kurang lebih 15 ha.
- b) Rencana Detail Tata Ruang Kota Parepare
- Secara khusus pemerintah Kota Parepare mengeluarkan peraturan Walikota Parepare nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik. RTH Publik yang disediakan ditetapkan dalam bentuk Unit RTH Publik atau Kelompok RTH Publik. Unit RTH Publik adalah satuan luas sebuah RTH Publik yang berdiri sendiri, dengan pengelolaan yang dilakukan secara tersendiri oleh Pemerintah Daerah. Kelompok RTH Publik adalah jumlah satuan luas dari beberapa RTH yang berada pada satu wilayah Kelurahan. Penyediaan lahan RTH Publik dilakukan melalui:

- 1) setiap pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan berupa gedung, wajib menyediakan lahan RTH paling kurang 10% dari lahan yang ditetapkan sesuai rencana tapak (*site plan*);
- 2) setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling-kurang 8 (delapan) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada salah satu sisinya, dengan lebar pedestrian paling-kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
- 3) setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling- kurang 15 (lima belas) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada kedua sisinya, dengan lebar pedestrian paling kurang 3 (tiga) meter;
- 4) setiap lahan tempat usaha yang akan dimanfaatkan, disediakan lahan RTH seluas 20% dari luas keseluruhan lahan yang akan dimanfaatkan;
- 5) bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas 3.000 (tiga ribu) meter persegi atau lebih, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan lahan RTH pengganti di tempat lain, dengan luas sebesar 20% dari luas lahan usahanya;
- 6) bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan RTH non- lahan/nonpermanen, dalam bentuk sejumlah pohon, pot-pot atau wadah lain, taman berdiri

(vertical-garden) atau taman atap (roof-garden), dengan luas disesuaikan kondisi dan kebutuhan; dan

- 7) pembangunan kawasan industri yang memiliki luas paling kurang 50 hektar, wajib ditetapkan RTH Hutan Kota di sekelilingnya (sebagai green belt/sabuk hijau), kecuali pada sisi yang terdapat jalan primer, dengan lebar RTH paling kurang 10 meter.

b. Profil Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bacukiki

a) Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bacukiki

Gambaran Umum Wilayah Penelitian di Kecamatan Bacukiki merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang. Adapun letak geografis antara 4°0'49.25" LS dan 119°39'6.30.52"BT. Secara administrasi, berbatasan sebagai berikut:

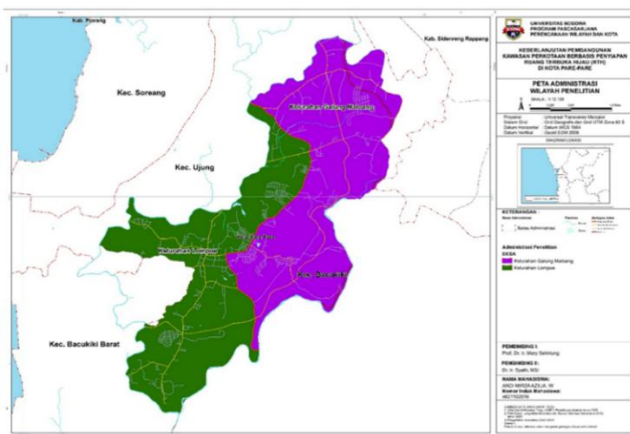
- Sebelah Utara: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pinrang
- Sebelah Timur: Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki
- Sebelah Selatan: Kelurahan Lumpue dan Watang Bacukiki
- Sebelah Barat: Kelurahan Sumpang Minangae

Luas Wilayah Penelitian adalah 1.718 Ha. Secara administratif Wilayah penelitian terdapat pada 3 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas WP dan Sekitarnya

No.	Kel/Desa	Luas (Ha)
1	Kelurahan Bukit Harapan	535.37
2	Kelurahan Galung Maloang	619.12
3	Kelurahan Lumpoe	564.86
Jumlah		1.718

Sumber: Hasil Delineasi, Tahun 2022



Gambar 2 Peta Administrasi Wilayah Penelitian

b) Sebaran RTH Kawasan Perkotaan Bacukiki di Kota Parepare

Pembangunan dan penyediaan RTH di Kota Parepare hingga saat ini cukup bervariasi, dengan luas lahan RTH yang tersedia kurang lebih 64.21 ha atau sekitar 5.22% dari

luas kawasan terbangun di perkotaan. Hal tersebut belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 20%, sehingga masih memerlukan lahan peruntukan RTH baru seluas 182,02 ha.

Terdapat selisih antara hasil survei inventarisasi dan pemetaan RTH di Kota Parepare dengan hasil dari program kerja Kemeterian PUPR dalam kegiatan “Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Parepare”. Di mana hasil dari kegiatan itu menunjukkan luas RTH Eksisting Kota Parepare seluas 1.763 ha. Data tersebut bersumber dari Bappeda Kota Parepare tahun 2012 dan cukup berbeda signifikan. Namun dalam kegiatan ini data sebaran RTH eksisting bersumber dari RTRW Kota Parepare tahun 2011 – 2031.

Hasil survei dan identifikasi sebaran RTH di Kota Pare-Pare, menunjukkan, RTH yang terdapat di Kota Parepare sebanyak 92 unit yang tersebar pada beberapa titik lokasi. Adapun jenis RTH yang tersedia berupa taman kota, rimba kota dan pemakaman. Secara rinci luas RTH di Kota Pare-Pare, diuraikan pada tabel berikut:

c) Profil dan Kualifikasi RTH Kawasan Perkotaan Kecamatan Bacukiki

Spesifikasi setiap RTH yang terdapat di Kota Pare-Pare, khususnya di Kecamatan Bacukiki cukup bervariasi, dan menyesuaikan peruntukan atau jenis RTH yang tersedia. Adapun profil RTH secara umum yang tersebar di Kecamatan Bacukiki, meliputi:

1) Taman Kota

RTH berupa taman kota hingga saat ini tersedia sebanyak 58 unit, dengan memanfaatkan lahan sekitar 26,26 ha. Umumnya taman kota yang terbangun memiliki sistem penyerapan air yang cukup bagus, dengan rata-KDH yang tersedia berkisar antara 8-90% dari luas RTH, dominasi tanaman hias, dan dilengkapi oleh fasilitas taman yang cukup memadai seperti, bangku taman, lampu taman, papan informasi dan system jaringan infrastruktur. Secara spesifik RTH berupa taman kota di Kota Pare-Pare, diuraikan pada tabel berikut:



Gambar 3 Visualisasi Taman kota di Kota Parepare

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan, 2023

2) Rimba Kota

RTH dengan kategori Rimba Kota di Kota Pare-Pare, terdapat pada 1 lokasi, dengan luas total kurang lebih 13,89

ha. Unit RTH rimba kota dengan ID PR-20 merupakan hutan yang dikelola langsung oleh pemerintah Kota Pare-Pare dengan memberikan nama lokasi tersebut dengan nama Kebun Raya Jompie. Vegetasi dan sarana prasarana di lokasi tersebut sangat menunjang dari segi pemanfaatan lahan sebagai kawasan RTH yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memanjakan pengunjung di kawasan tersebut.



Gambar 4 Visualisasi Rimba kota di Kota Parepare

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan

3) Pemakaman

Taman pemakaman merupakan klasifikasi zona RTH, yang sebarannya sebanyak 33 lokasi di Kota Pare-Pare. Luas total lahan peruntukan pemakaman kurang lebih 24,06 ha, spesifikasi pada Tabel 2. berikut:



Gambar 5 Visualisasi Taman Pemakaman di Kota Parepare

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan, 2023

c. Arahannya Strategi Pemenuhan RTH

Analisis strategi pemenuhan kebutuhan proporsi RTH Publik di kawasan perkotaan dalam lingkup wilayah Ajatappareng diintegrasikan kedalam analisis SWOT yang mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal mencakup kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sementara analisis lingkungan eksternal mencakup peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan alternatif strategi yang tepat dalam penyelenggaraan RTH Publik di wilayah Ajatappareng.

Sebagai gambaran bahwa metode SWOT merupakan salah satu metode yang seringkali digunakan dalam suatu perencanaan strategi, dan sangat implikatif di dalam analisisnya. SWOT akan mencari faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor peluang yang dihadapi, sehingga

seringkali disebut juga sebagai metode analisis situasi. Penyajian hasil identifikasi disusun dengan menggunakan matriks SWOT yang ditunjukkan pada Gambar 1. berikut:

Internal Eksternal	Strength (S) *Faktor Kekuatan	Weakness (W) *Faktor Kelemahan
Opportunities (O) *Faktor Peluang	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T) *Faktor Ancaman	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi TW Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 6. Matriks Analisis SWOT

Sumber: Rangkuti, 2018

Berdasarkan peraturan yang berlaku dan karakteristik penyelenggaraan, maka arahan kebijakan dan strategi penyelenggaraan RTH Publik di kawasan perkotaan dalam lingkup wilayah Ajatappareng mengacu kepada isu-isu strategis pada tiga aspek yaitu aspek pemerintahan, aspek kerjasama swasta/masyarakat dan aspek teknis pengelolaan RTH.

Merujuk pada Matriks analisa SWOT (Gambar 5.14), faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) terkait pemenuhan kebutuhan RTH Publik di kawasan perkotaan di wilayah Ajatappareng ditunjukkan pada tabel berikut

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau merupakan unsur esensial dari sebuah wilayah perkotaan, dalam menciptakan pembangunan kota diharuskan berwawasan lingkungan. Hal tersebut telah disampaikan dalam Deklarasi Rio 1992. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan hal wajib, sebagai pemenuhan prinsip berkelanjutan. Sumber daya alam yang dimiliki saat ini harus dirasakan juga oleh generasi yang akan datang. Berada di iklim tropis membuat Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Hal tersebut merupakan hal yang baik bagi Negara Indonesia. Banyak negara- negara yang mengalami krisis sumber daya alam (SDA), Indonesia dapat menambah devisa dengan cara berdagang hasil SDA ke negara lain. Memiliki iklim yang baik membuat Indonesia mudah menciptakan kawasan hijau, pembangunan kawasan hijau telah di atur dalam UU Nomor 26/2007 Tentang Penataan Ruang, berlandaskan Deklarasi Rio 1992 UU Tata Ruang Tercipta.

Kawasan hijau identik dengan taman kota, akan tetapi berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2007, bukan hanya taman kota saja yang digolongkan sebagai RTH. Kawasan Kecamatan Bacukiki di Kota Parepare dikenal dengan tematik yang beragam, namun hal tersebut tidak menambah besaran RTH di Kawasan Perkotaan Bacukiki dikarenakan hanya memperbaiki dari kualitas yang sebelumnya, pemenuhan besaran RTH yang diatur dalam UU Penataan Ruang haruslah dipenuhi, pasalnya hal tersebut merupakan pembangunan jangka panjang. Pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan berlandaskan prinsip berkelanjutan.

Secara teknis setiap kawasan perkotaan di wilayah Kecamatan Bacukiki telah melakukan perencanaan penambahan RTH eksisting dari RTH rencana dalam penyusunan RDTR wilayah perkotaan atas Kota Parepare. Walaupun dalam analisis dari RTH eksisting ditambah dengan RTH rencana (potensi) masih belum memenuhi aspek lahan terbangun, luas wilayah perkotaan dan jumlah penduduk di beberapa wilayah perkotaan kecamatan Bacukiki, namun secara perhatian dari pemerintah setiap kawasan di wilayah Kecamatan Bacukiki telah serius dalam menanggapi hal yang terkait dengan lingkungan dalam hal ini pemenuhan RTH wilayah perkotaan

Daftar Pustaka

- Benton-Short, L., & Keeley, M. (2023). Urban Sustainability. *The Routledge Companion to the American Landscape*, 267-280.
- Botsios, A. E., Sabbagh, H., Romain, D., Theodorakis, A., & Karampelas, A. (2022). Modelling a Sustainable Smart City. *Open Schools Journal for Open Science*, 5(2).
- Dong, Q., Yi, P., Li, W., & Wang, L. (2022). Evaluation of city sustainability using the HGRW method: A case study of urban agglomeration on the West Side of the Straits, China. *Journal of Cleaner Production*, 358, 132008.
- Lee, E., & Kim, G. (2023). Green Space Ecosystem Services and Value Evaluation of Three-Dimensional Roads for Sustainable Cities. *Land*, 12(2), 505.
- Lestari, A. W., Yuniningsih, T., Larasati, E., & Adhitama, M. O. (2023). Sustainable Development Based Tourism in Batu City. *KnE Social Sciences*, 447-458.
- Lovie, J. (2020). Toward a Sustainable Future: An Exploratory Approach to the Dynamics of Europe's Urban Morphology and Sustainability.
- Mahendra, I. G. I., & Dwijendra, N. K. A. (2022). Evaluasi Penerapan Green City Pada Taman Kota (Studi Kasus: Taman Kota Lumintang Denpasar). *RUAS*, 20(1), 74-86.
- Mihaylov, V., & Sala, S. (2022). Planning "the Future of the City" or Imagining "the City of the Future"? In Search of Sustainable Urban Utopianism in Katowice. *Sustainability*, 14(18), 11572.
- Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pare-Pare tahun 2018 – 2023.
- Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
- Perdigones, A., Mazarrón, F. R., & García, J. L. (2023). Green Areas to Introduce Sustainability and Social Responsibility: Training on Agenda 2030. In *Considerations on Education for Economic, Social, and Environmental Sustainability* (pp. 156-175). IGI Global.
- Purcell, P. H. (2022). *The Sustainable City. The Climate City*, 72-91.
- Rama, M., Carral, E., González-García, S., Torres-Feijó, E., del Rio, M. L., Moreira, M. T., & Feijoo, G. (2022). Balance between hosts and guests: The key to sustainable tourism in a Heritage city. *Sustainability*, 14(20), 13253.
- Rangkuti, Freddy. 2018. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Romanelli, M. (2023). Driving Cities as Sustainable Urban Communities. In *Smart Technologies for Organizations: Managing a Sustainable and Inclusive Digital Transformation* (pp. 181-191). Cham: Springer International Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tian, X., Liu, W., & Zhao, Q. (2023). Chengde City in the Perspective of Sustainable Economic Development Eco-city construction study. *Academic Journal of Management and Social Sciences*, 2(2), 56-64.
- Toda, H., Rihi, D. W., Daeng, E., & Fallo, A. R. (2023). Sustainability Analysis of Green Open Space Development of Kupang City Nostalgic Park. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(5), 1139-1146.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Utami, W. D., Hasriyanti, N., & Vanziru, C. T. (2023). Eco-City-Based Sustainable Settlement Planning In Bengkulu New City Area. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(4), 1-10.